



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUSTAQIM**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA**
3. NHK : **712195**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/108 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 2781 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 242.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER/SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT/SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX/ SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER/MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HADIAH Rp. 12.500.000
6. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 15.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 141.251.757**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	1.798.751.757
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.798.751.757

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.